

**PENGELOLAAN PROGRAM SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS
MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2012-2015.
STUDI KASUS: KAMPUNG BUSTAMAN KELURAHAN
PURWODINATAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH**

**ANGGA RATTAFAARY
(DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN FISIP UNDIP,
SEMARANG)**

ABSTRAKSI

Sanitasi lingkungan yang buruk masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Pemenuhan kebutuhan sanitasi yang baik pun diberlakukan di kota-kota besar di Indonesia. Kota Semarang sebagai kota dengan sanitasi terburuk urutan kedua dalam hal sanitasi lingkungan, telah membuat program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) sebagai bentuk konsentrasi terhadap masalah sanitasi, yang salah satunya dilakukan di Kampung Bustaman. Program Sanimas melibatkan peran pemerintah, masyarakat setempat, dan swasta. Keterbatasan pemerintah dalam menjalankan program akan teratasi dengan adanya kesepakatan atau jaringan (*network*) dengan aktor lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan cara pengelolaan, peran pemerintah, masyarakat/NGO, dan swasta, serta konsep *networking* dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Kampung Bustaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam dan observasi. Subyek penelitian ini berjumlah dua orang sebagai informan utama dan dua orang sebagai informan triangulasi dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya piranti kelembagaan yang disusun bersama oleh semua pihak, adanya kepemimpinan pionir, yaitu pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam program sanimas, adanya pemahaman yang sama antar aktor dalam perencanaan teknis dan pelaksanaannya, dan adanya alat pengelolaan program sanimas. Keterlibatan tiga aktor dalam pelaksanaan program sudah terlaksana secara berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak. Dengan kondisi yang sudah baik, maka model yang dilakukan di Kampung Bustaman ini dapat dijadikan percontohan di tempat lain jika kondisinya sama.

Kata Kunci : Sanitasi, Pengelolaan, *Networking*.

**MANAGEMENT OF COMMUNITY-BASED ENVIRONMENTAL
SANITATION PROGRAM IN SEMARANG CITY 2012-2015.
CASE STUDY: KAMPUNG BUSTAMAN, SUB PURWODINATAN,
DISTRICT CENTRAL SEMARANG**

**ANGGA RATTAFARY
(POLITICAL AND GOVERNMENT DEPARTMENT OF SOCIAL AND
POLITICAL SCIENCE FACULTY, DIPONEGORO UNIVERSITY,
SEMARANG)**

ABSTRACT

Poor environmental sanitation remains one of the sanitation problem in Indonesia, including Semarang .The compliance of good sanitation was enforced in major cities in indonesia. Semarang city that ranked as the worst environmental sanitation in second place, has made an Urban Community-Based Sanitation program (SPBM), as the concern to sanitation problem, that one of them has been implemented in Bustaman. Communal sanitation program involved by the government, local community, and private parties. Either agreement or networking with other parties will overcome the problem of limited government in implementating program. This study aimed to reveal the management system, role of government, society, and private parties, also networking concept in management program communal sanitation at Kampung Bustaman.

This research is a descriptive qualitative in-depth interviews and observation. The subjects of this study amounted to two as key informants and two as triangulation informants where purposive sampling technique was used to determine samples.

The results showed management of communal sanitation program had run well. It proved by the institutional tool that arranged by all the parties in common; the pioneering leadership, that government as the main responsible of the running program; the common comprehension of technical planning and implementation; and the management tool of communal sanitation program. Involvement of three actors has been implemented sustainably, so that providing beneficial results for all the parties. In this good condition, the model of communal sanitation that used in Bustaman should be adopted by other urban areas, where have the same condition.

Keywords: Sanitation, Management, Networking.

1. Pendahuluan

Pembangunan milenium atau Milenium Development Goals (MDG's) adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan. Salah satu tujuan dari kesepakatan MDGs adalah menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target yang berkaitan dengan sanitasi adalah mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses air minum dan sanitasi dasar yang layak.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani deklarasi tersebut telah berusaha mewujudkan komitmen mewujudkan MDG's. Namun demikian, khususnya untuk tujuan berkaitan dengan sanitasi masih jauh dari harapan. Pemenuhan kebutuhan sanitasi yang baik diberlakukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia, pada kota-kota besar di Indonesia salah satunya di kota Semarang. Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya kota metropolitan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kemajuan pembangunan Kota Semarang juga dapat mendukung perkembangan daerah-daerah disekitarnya.

Pada tahun 2010 kota Semarang menjadi kota dengan sanitasi terburuk dengan urutan kedua dalam hal sanitasi lingkungan. ¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang menyebutkan sekitar 37 persen warga di wilayah ini belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Data terakhir

¹ Alkomari.(2010). Sanitasi Kota Semarang buruk. <http://www.ampl.or.id/digilib/read/sanitasi-kota-semarang-buruk/46503>. Di unduh pada 10 Desember 2015 pukul 15.00 WIB.

tahun 2013, hanya 63 persen warga Kota Semarang yang sudah memiliki dan terlayani fasilitas sanitasi yang layak. Dan berita tersebut terus berulang hingga tahun 2014.²

Permasalahan tersebut sampai sekarang belum bisa teratasi. Seharusnya pemerintah sebagai organisator dari negara, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusi warga negara atas lingkungan hidup yang baik. Hal tersebut sesuai dengan asas tanggung jawab negara yang tercantum dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam era Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengelola lingkungan di daerahnya tidak terkecuali dalam pengelolaan sanitasi.³

Pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah sanitasi salah satunya dengan membuat program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat . Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat adalah salah satu komponen dari program Sanitation and Rural Infrastructure (USRI).

Kota Semarang Sebagai salah satu kota yang sudah menerapkan program tersebut, awalnya pengembangan program Sanimas di Kota Semarang (tahun 2005), pembangunan di laksanakan di wilayah permukiman Kampung Bustaman (RT 04-05 RW 03), Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah

²Bilal Ramadhan.(2014).37 warga Kota Semarang belum terlayani dengan baik.<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/04/25/n4leyh-37-persen-warga-kota-semarang-belum-terlayani-fasilitas-sanitasi>. Di unduh pada 10 Desember 2015 pukul 15.00 WIB

³I Gusti Ayu Ketut Rachmi. 2011.*Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Justisia edisi 82 : 75-81

dengan aplikasi (kontruksi) berupa MCK plus yang pada awal pembangunannya di proyeksikan untuk melayani sekitar 124 kk. Kemudian pada tahun 2006-2008, pembangunan Sanimas terdapat di daerah Kecamatan Semarang Utara yaitu Kampung Plombokan RT 04-05 RW 03 (tahun 2006), Kelurahan Bandarharjo RW 03 (tahun 2007), dan Kebonharjo RT 02 RW 02 (tahun 2008). Dari tahun ke tahun berjalanya program Sanimas yang ada di Kota Semarang, hanya Sanimas yang terdapat di Kampung Bustaman yang berhasil dalam pelaksanaannya. Keberhasilan ini tampak dengan di jadinya salah satu percontohan/*pilot project* di Indonesia yang berhasil mengembangkan sanitasi berbasis masyarakat dan mampu menjadi contoh sadar lingkungan terhadap masyarakat lain.⁴ Berbanding terbalik dengan berita yang selalu muncul bahwa sanitasi di Kota Semarang yang buruk tetapi masih ada satu daerah yang dapat menjadikan percontohan/ *pilot project* di Indonesia. Ini harusnya dapat di terapkan juga di daerah lain khususnya di Kota Semarang agar pemenuhan sanitasi terlayani dengan baik. Tentunya itu juga di ikuti dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas lingkungan sekitar lokasi pengembangan pengembangan program dan tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan tersebut bukan semata-mata di lakukan oleh Pemerintah Daerah, karena Sanimas merupakan program yang dimana masyarakat yang menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola system yang mereka pilih sendiri, dengan di fasilitasi oleh swasta atau konsultan pendamping yang bergerak secara professional dalam bidang teknologi pengolahan limbah maupun

⁴PekaKota.(2015).Kampung Bustaman jadi Model Percontohan Program Sanimas.<http://pekakota.or.id/kampung-bustaman-jadi-model-pengelolaan-program-sanimas>.Di unduh pada 10 Desember 2015 pukul 15.00 WIB.

bidang sosial. Pemerintah Daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat yang ada. Keberhasilan Sanimas yang ada di Kampung Bustaman tidak jauh dari peran serta masyarakat Kampung Bustaman itu sendiri, peran komunitas di Kampung Bustaman dalam pengoptimalan peran serta warganya berhasil dengan di bentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanimas Pangrukti Luhur dan menghasilkan produk MCK Plus, yaitu selain di buat untuk MCK limbah-limbah yang ada juga di manfaatkan sebagai biogas.

Adanya latar belakang yang sama bermukim di permukiman padat perkotaan dan membutuhkan Sanitasi lingkungan yang baik, sehingga pemerintah dan masyarakat mempunyai timbal balik untuk kemajuan pembangunan dan kehidupan yang layak di satu daerah dengan penerapan program sanitasi berbasis masyarakat dengan memberdayakan masyarakat setempat. Dapat dilihat bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan (steering) terbatas. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah/Negara bukanlah satu-satunya pusat kekuatan/kekuasaan dalam masyarakat. Pengalaman selama bertahun-tahun telah menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk memerintah terbatas dan untuk itu diperlukan kesepakatan atau jaringan (network) dengan aktor penting lainnya dalam sektor kebijakan dimana pemerintahan itu berjalan. Perubahan sudut pandang mengenai pemerintahan ini muncul karena kesadaran bahwa dengan semakin berkembangnya peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbatasan yang dimiliki pemerintah (yang dijalankan melalui birokrasi) akan dapat diatasi dengan melakukan jaringan (network) dengan pihak-pihak lain diluar pemerintah.

2. Metode Penelitian

2.1 Teori

1. Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat yang baik seharusnya perlu dilengkapi dengan komponen-komponen yang diramu dalam suatu piranti pengelolaan (*management arrangement*) sebagai raganya.. Namun dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan memerlukan empat persyaratan utama yaitu : (1) kepemimpinan pionir (*initial leadership*) (2) piranti kelembagaan (3) kemampuan teknis (*technical capacity*) dan (4) alat pengelolaan.

2. Jejaring/Network

Network atau bisa disebut jejaring adalah hubungan antar aktor dalam lingkaran kerja yang sifat hubungannya setara, dijaga atas dasar kepercayaan dan timbale balik. Mereka merupakan koalisi dari aktor-aktor yang mempunyai tujuan dan nilai-nilai kepentingan yang berbeda dalam perumusan suatu kebijakan.

3. Kemitraan/*Partnership*

Kemitraan atau *partnership* adalah jalinan kerjasama antar pelaku kegiatan atau kongsi yang dijalin dimana pelakunya adalah pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam lingkaran kerja tersebut. Kemitraan dapat terjalin atas dasar kebutuhan satu sama lain akan kemampuan yang tidak dimiliki dirinya, selain ada kepentingan masing-masing pihak yang hendak dicapai. Kemitraan yang terjalin biasanya terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil atau *stakeholders* lain yang bisa membawa keuntungan maksimal bagi sebuah program.

2.2 Metoda

Penelitian tentang Pengelolaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memahami dan juga mengidentifikasi masalah yang ada. Lokasi penelitian adalah di Kampung Bustaman Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah menelaah sumber data yang ada, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian

3.1 Pendekatan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kampung

Bastaman

Tahap Persiapan. Diawali dengan penentuan lokasi yang membutuhkan sarana prasarana sanitasi lingkungan oleh pemerintah. Pemilihan Kampung Bastaman didasarkan oleh kesesuaian kriteria, yaitu kondisi perkampungan yang padat, kumuh, dan miskin, kondisi sanitasi yang buruk, dan kesiapan dari masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu penentuan calon pengguna, yang dilakukan secara bekerjasama dengan masyarakat dalam pendataan penduduk. Pemerintah juga memberikan solusi teknis sesuai keadaan dan kemampuan anggaran yang ada, kemudian dibentuklah kelompok swadaya masyarakat yang dianggap mampu bekerjasama dalam mewujudkan program bersama.

Tahap Perencanaan. Pemerintah bukan lagi yang menentukan bagaimana program akan berjalan, tetapi lebih memfasilitasi inisiatif KSM yang telah terbentuk, bukan sebagai pengelola. Masyarakat yang banyak andil dalam tahap ini, yaitu merencanakan program dan pengelolaan jangka panjangnya, yang kemudia dibentuk panitia pembangunan dan panitia badan pengelola. Pihak swasta pun ikut serta dalam tahap ini sebagai konsultan pendamping. LSM BORDA ikut merencanakan konstruksi dan pemilihan teknologinya.

Tahap Pelaksanaan. pelaksanaan kontruksi dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pelaksanaan kontruksi mencakup pekerjaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan pekerjaan MCK. Pelaksanaan kontribusi masyarakatnya dilakukan dalam bentuk dana *in cash* dan *in kind*. Selain itu, pelatihan pun dilaksanakan untuk menunjang keberjalanan program, seperi pelatihan teknis, manajemen, dan kampanye kesehatan.

Tahap Pengawasan. Pengawasan dilakukan bersama-sama oleh ketiga pihak. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokkan, serta menemukan penyebab ketidakcocokan. Dalam program ini, pengawasan *intern* dilakukan oleh KSM secara langsung dan rutin, sedangkan pengawasan *ekstern* dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

Tahap Pemeliharaan. MCK Plus yang sudah terbentuk tentunya membutuhkan pemeliharaan seperti pengurusan bak utama penampung air untuk mengalir setiap kamar mandi yang akan digunakan. Selain itu pengecekan pemipaan bak kontrol (bak dibawah MCK), komponen pengolahan, biogas, sedimentasi, *baffle reactor*, *anaerobic filter*. Semua itu dilakukan secara berkala

dan semua biaya pemeliharaan bersumber dari kontribusi bulanan maupun iuran langsung dari masyarakat.

3.2 Pengelolaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kampung

Bustaman

Ada empat syarat utama dalam keberhasilan pengelolaan sanimas, yaitu adanya piranti kelembagaan yang telah tersusun secara rinci dan detail oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Adanya kepemimpinan pionir, yang utama adalah pemerintah yang bertanggungjawab utama dalam berjalannya program dalam penentuan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM. Selain itu, kemampuan teknis, dimana ketiga pihak telah merumuskan bersama-sama rencana teknis yang akan dilaksanakan bersama. Serta alat pengelolaan, yang sudah dianggarkan di RAB operasional dan perawatan.

Terpenuhinya syarat-syarat diatas menunjukkan bahwa pengelolaan sanimas di Kampung Bustaman tergolong berhasil, keterlibatan tiga aktor dalam pengelolaan program sanimas secara berkelanjutan dan berkesinambungan, menghasilkan salah satunya ialah biogas yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat sebagai hasil dari pengolahan limbah.

3.3 Networking (Jejaring) dalam Sanimas Kampung Bustaman.

Dalam program sanimas ini ada tiga aktor yang berperan dan menjalankan tugasnya bersama dengan tujuan dan kewenangan yang sama, yaitu pemerintah dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan organisasi yang terfokus pada sanitasi lingkungan, yaitu LSM

BORDA dari Jerman. Hubungan profesional yang terbentuk melalui jaringan ini akan memudahkan dalam pengambilan tindakan bersama.

Masyarakat tentunya memiliki peranan penting didalamnya. Pada proses perencanaan, misalnya, masyarakat/KSM yang melakukan pemetaan sanitasi untuk pengumpulan data dan mendeskripsikan kondisi sanitasi di Kampung Bustaman. Pada tahap pelaksanaan hingga pengelolaan, partisipasi masyarakat/KSM diberikan dalam bentuk tenaga, yaitu pada proses pembangunan fisik sarana prasarana sanitasi dan gotong-royong secara rutin selama program ini berlangsung. Sedangkan partisipasi dalam bentuk materil diberikan pada tahap pembangunan, perawatan, dan pengelolaan melalui iuran, baik iuran untuk pengoperasian maupun perawatan sarana-prasarana.

Peran partisipasi pemerintah dalam sanimas ini adalah sebagai pengendali utama atas ketercapaian dan keberlangsungan program. Pemerintah lebih memiliki peran pada tahap persiapan dibanding pengelolaan hingga pemeliharaan, seperti menentukan lokasi, membentuk KSM, menentukan pihak yang akan bekerjasama, dan mengkoordinir semua kebutuhan program, serta menyumbang separuh dari RAB yang dibutuhkan. Akan tetapi, meskipun kewenangan dilimpahkan ke masyarakat, pemerintah tetap mengawasi dan mengevaluasi keberlangsungan program sanimas di Kampung Bastaman ini.

Di pihak swasta, LSM BORDA yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama pun ikut berperan dalam keberlangsungan program sanimas yang ada di Kampung Bustaman. Selain memberikan sedikit dana, LSM BORDA juga memberikan ide konsep konstruksi sanimas yang akan ditawarkan kepada

pemerintah dan masyarakat. BORDA memberikan pelatihan kepada KSM yang akan mengeksekusi program animas. Peran BORDA sama halnya dengan pemerintah, yaitu hanya memonitoring keberlangsungan program, disamping memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan perawatan yang baik untuk sistem IPAL komunal kepada masyarakat.

3.4 Prinsip Kemitraan

Ada tiga kunci utama yang terbangun dari terbentuknya kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan asas manfaat bersama. Pihak-pihak yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati, mengingat ketiganya saling membutuhkan satu sama lain. Pada program animas ini, ketiga aktor mempunyai kedudukan yang sama, karena dalam setiap perumusan untuk pencapaian keberhasilan program tersebut dilakukan musyawarah dari tahap persiapan hingga pengawasan.

Keterbukaan terhadap kekurangan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki juga penting untuk dijaga sejak dimulainya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Misalnya, dari awal pelaksanaan program animas ini pemerintah menjelaskan kebutuhannya akan KSM untuk keberlangsungan program dan secara terbuka mengajak pihak swasta untuk ikut bekerjasama. Dari pihak swasta juga secara terbuka memberikan dana dan penggunaan teknologi sesuai konsep konstruksi dan biaya yang dikumpulkan. Oleh karena itu, kelemahan dalam ide dan kewenangan masyarakat pun dapat teratasi. Dengan ini, program akan berjalan dengan baik dan masing-masing pihak tentunya mendapat manfaat

sesuai dengan kontribusinya. Dari pemerintah tentunya mendapat kepercayaan lagi oleh masyarakat akan pemenuhan pelayanan publik yang baik dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak. Dari pihak swasta tentu fapat menyalurkan apa yang dimilikinya secara tepat guna dan pemenuhan akan kebutuhan penelitian bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Masyarakat pun ikut merasakan manfaatnya dengan terciptanya sanitasi lingkungan yang lebih sehat dan higienis yang meningkatkan derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat.

4. Simpulan

Dalam pengelolaan animas di Kampung Bustaman ini sudah mencakup empat persyaratan utama dalam keberhasilan pengelolaan.

Pertama adanya piranti kelembagaan sudah tersusunnya secara rinci dan detail disusun bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, swasta dan menghasilkan suatu bentuk kelembagaan yang memiliki pedoman berupa anggaran dasar/AD dan anggaran rumah tangga/ART sederhana sebagai pedoman kerjanya.

Kedua, adanya kepemimpinan pionir, yang utama adalah pemerintah yang bertanggungjawab utama dalam berjalannya program dalam penentuan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM, setelah berjalannya program kewenangan kepemimpinan itu diberikan kepada ketua KSM sebagai pengelola program animas yang sudah terbentuk, akan tetapi pemerintah masih memiliki peran yang sangat bertanggung jawab akan keberhasilan program.

Ketiga, kemampuan teknis, pemerintah, masyarakat dan swasta merumuskan bersama-sama bagaimana rencana teknis yang akan dilaksanakan bersama, dan dalam program animas di Kampung Bustaman ini terbukti telah mampu menjalankan secara teknis apa yang sudah direncanakan bahwa program tersebut dapat terlaksana dan berkelanjutan sampai saat ini. Artinya dalam perencanaan teknis dan pelaksanaannya adanya pemahaman yang sama antar aktor yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan program animas di Kampung Bustaman.

Keempat, alat pengelolaan, dalam pengelolaan program animas di Kampung Bustaman ini tentunya juga tidak lepas dari alat pengelolaannya. Alat pengelolaan tersebut sudah di anggarkan di rencana anggaran biaya operasional dan perawatan. Alat pengelolaan tidak terlalu banyak memakan biaya karena hanya sedikit alat pengelolaan yang permanen untuk digunakan pada saat pengelolaan. Selebihnya alat pengelolan adalah sepenuhnya dilakukan oleh operator animas dari masyarakat sendiri.

Adanya empat persyaratan utama dalam pengelolaan animas di Kampung Bustaman menunjukkan bahwa pengelolaan animas di Kampung Bustaman tergolong berhasil, selain itu adanya kemitraan yang terjadi antar tiga aktor yang berperan dan saling membantu bekerjasama dalam program sanitasi berbasis masyarakat di kampung bustaman menghasilkan sistem berjalan dengan baik dan tujuan program terlaksana dengan baik. Keterlibatan tiga aktor dalam pemahaman bersama dalam pengelolaan program animas yang sudah terlaksana secara berkelanjutan dan berkelanjutan, menghasilkan beberapa hasil salah satunya adalah hasil dari pengolahan limbah yang diolah dapat menghasilkan biogas yang

dapat digunakan oleh masyarakat setempat untuk digunakan sebagai keperluan memasak, perbaikan infratraktur di Kampung Bustaman, berhasilnya dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kampung Bustaman, meningkatnya derajat kesehatan yang lebih baik selain itu masih banyak hasil yang sangat menguntungkan kepada tiga aktor yang berperan, ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat membutuhkan adanya *networking* dalam pelaksanaan program sanimas, sekaligus ini yang menjadikan pembeda antara sanimas Kampung Bustaman dan sanimas yang lain.